

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk mengetahui sejauh mana topik yang sama telah dikaji untuk menemukan kesenjangan penelitian, memperkuat argumen teoritis, serta memahami pola temuan yang sudah ada. Dengan demikian, penelitian terdahulu bukan hanya sebagai acuan pembandingan, tetapi juga landasan untuk mempertegas posisi dan kontribusi dalam penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti melakukan peninjauan pada beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan modal sosial, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan sampah melalui bank sampah.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian
Arifka Maulida Nurazizah dalam <i>Journal of Gender and Family Studies</i> (2021) yang berjudul “Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Bank Sampah Ngudi Makmur Dusun Serut;Desa Ponjong, Kepanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta”	Penelitian ini berfokus pada tahapan pelaksanaan program bank sampah dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan melalui pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan kerangka tahapan pemberdayaan yang meliputi tahap penyadaran, transformasi kemampuan, dan peningkatan kemampuan intelektual untuk menganalisis proses pemberdayaan di Bank Sampah Ngudi Makmur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank sampah berhasil menjadi wadah untuk memberdayakan ibu-ibu PKK melalui tiga tahapan sistematis.
Perbedaan: Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah pada fokus penelitian, di mana penelitian ini berfokus pada proses dan tahapan pemberdayaan, sementara penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pemberdayaan perempuan yang berbasis modal sosial, di mana dalam penelitian tersebut tidak membahas terkait unsur modal sosial.	

<p>Khairunnisa Dhita, Khansa Nur Husna, Ahmad Tarmizi dalam <i>Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin</i> (2022) dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Bank Sampah Mawar Lima (Program Corporate Social Responsibility PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Wayame)”</p>	<p>Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian merupakan jenis bank sampah korporat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam seluruh proses pemberdayaan perempuan menjadikan mereka lebih mandiri dalam meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan bersama, serta meningkatkan pendapatan ekonomi mereka hingga Rp.1.000.000,-.</p>
<p>Perbedaan: Penelitian ini tidak menggunakan unsur modal sosial dalam proses analisis penelitian. Selain itu terdapat adanya perbedaan pada model operasional bank sampah, di mana model operasional bank sampah pada penelitian ini melalui program CSR, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan model operasional bank sampah mandiri yang dibentuk oleh masyarakat.</p>	
<p>Ika Januar Anggraeni, Hamyana, dan Muhammad Saikhu dalam <i>Jurnal Penelitian</i> (2020) dengan judul “Pengaruh Modal Sosial Terhadap Keberlanjutan Program Bank Sampah di Kabupaten Bondowoso”</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana modal sosial mempengaruhi keberlanjutan program bank sampah di Kabupaten Bondowoso. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif melalui analisis regresi linier sederhana dengan 69 responden dari 5 kelompok bank sampah, hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan program. Dalam penelitian ini, unsur modal sosial terintegrasi dengan baik. Kepercayaan antar anggota dan pengurus bank sampah selalu terjaga yang ditunjukkan melalui perilaku jujur dan teratur. Norma berfungsi untuk menjaga disiplin konsistensi warga dalam berpartisipasi. Disisi lain, jaringan sosial juga terbentuk melalui hubungan sosial karena adanya kegiatan bersama-sama seperti arisan PKK.</p>
<p>Perbedaan: Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk mengukur pengaruh modal sosial terhadap keberlanjutan bank sampah, sementara penelitian yang akan peneliti lakukan akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menganalisis secara lebih mendalam bagaimana modal sosial</p>	

yang terbentuk dan berperan dalam proses pemberdayaan perempuan di Bank Sampah.	
Irma Dewi Istiqomah, Marjuki, dan Suharma (2023) dalam Jurnal Pekerjaan Sosial yang berjudul “Pengembangan Modal Sosial Pada Organisasi Bank Sampah Avatar Dalam Menangani Kemiskinan Melalui Agile Social”	Penelitian ini menggunakan model pengembangan modal sosial dengan mengadaptasi konsep Agile Manifesto untuk mengatasi rendahnya modal sosial, khususnya pada aspek norma dan jaringan sosial di Bank Sampah Avatar. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan Agile Social Capital Development Model berhasil meningkatkan aspek norma dan jaringan sosial yang sebelumnya sangat rendah yang ditunjukkan dengan pengurus yang mulai melakukan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat hingga terciptanya jadwal rutin dan kepengurusan semakin solid sehingga nasabah merasakan manfaat yang lebih nyata.
Perbedaan: Perbedaan yang mendasari adalah penelitian ini menggunakan pendekatan intervensi model agile, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah menganalisis modal sosial yang terbentuk dalam pemberdayaan perempuan melalui bank sampah dan faktor yang mempengaruhinya.	

Sumber: Data diolah, 2025

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Konsep dan Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat

Sulistiyani (2017) menyatakan pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan pada dasarnya adalah proses untuk membangun atau memperoleh kekuatan, kemampuan, serta daya, baik melalui pengembangan potensi dari dalam diri maupun melalui dukungan pihak yang memiliki daya terhadap kelompok yang masih belum berdaya. Dalam hal ini, pemberdayaan berarti memanfaatkan potensi yang telah ada dalam diri seorang individu ataupun kelompok sebagai penguatan kapasitas

dalam diri seseorang atau kelompok, sehingga mereka dapat mengontrol perubahan yang terjadi pada dirinya ataupun lingkungannya.

Konsep pemberdayaan tersebut kemudian berkembang lebih luas dalam konteks kehidupan sosial, yang tidak hanya berfokus pada individu melainkan juga berkontribusi pada kelompok atau komunitas masyarakat yang lebih luas yang dilakukan melalui konsep pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini pemberdayaan didasarkan pada kekuatan individu dan lingkungan sosialnya (Astutik & Abidin, 2020). Pemberdayaan masyarakat merupakan proses mempersiapkan dan memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka memiliki kapasitas untuk mencapai kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam tatanan hidup yang berkeadilan dan berkelanjutan (Afriansyah et al., 2023).

Jim Ife dan Frank Tesoriero mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai proses memberikan sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat, sehingga mereka memiliki kapasitas untuk menentukan arah masa depan sendiri serta berperan aktif dalam mempengaruhi kehidupan kelompoknya (Afriansyah et al., 2023). Sejalan dengan ini, Sunartiningsih juga menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusannya sendiri (Sukmana, 2010).

Lebih lanjut, Sumaryo Gitosaputro dan Kardiyana K. Rangga menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses

pembangunan yang mendorong masyarakat untuk dapat berinisiatif dalam melakukan kegiatan sosial serta memperbaiki situasi dan kondisi mereka sendiri (Afriansyah et al., 2023). Suharto dalam Afriansyah, dkk. (2023) juga menyatakan pendapatnya mengenai pemberdayaan masyarakat, yakni pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai rangkaian proses kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat kelompok yang lemah dalam masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah untuk mencapai suatu kondisi perubahan sosial di mana masyarakat menjadi berdaya, memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam aspek fisik, ekonomi, maupun sosialnya melalui sikap percaya diri, kemampuan menyampaikan pendapat, memiliki pekerjaan, ikut serta dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Adapun menurut Astutik (2013) menyatakan bahwa pemberdayaan juga menyangkut bagaimana relasi sosial yang terjadi antara para pelaksana dan penerima program untuk menunjang keberhasilan sebuah program

Pemberdayaan masyarakat menurut para ahli di atas dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses penguatan kapasitas kolektif dalam masyarakat agar mereka mampu berinisiatif, berpartisipasi aktif, dan menentukan arah masa depan kelompok atau komunitasnya secara mandiri dan berkelanjutan. Proses ini mencakup rangkaian kegiatan yang bertujuan memperkuat kelompok yang masih belum berdaya dalam masyarakat untuk mendorong terjadinya perubahan sosial dengan memperhatikan relasi sosial yang terjalin di dalamnya sebagai penguat

keberhasilan program. Melalui pemberdayaan masyarakat, diharapkan mereka dapat menjadi berdaya, memiliki pengetahuan, kemampuan, dan kekuasaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, ataupun sosial.

2. Tahap Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagai proses dalam pembangunan, memerlukan langkah yang sistematis agar perubahan yang diharapkan dapat tercapai dan berkelanjutan. Proses ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan dan membentuk rangkaian perkembangan kesadaran, kapasitas, dan kemandirian. Dalam hal ini, Sulistiyani (2017) membagi proses pemberdayaan dalam beberapa tahapan yang diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap Penyadaran dan Pembentukan Perilaku

Tahap penyadaran dan pembentuk perilaku merupakan tahap awal dalam proses pemberdayaan. Pada tahap ini, pihak yang melakukan pemberdayaan berupaya menciptakan kondisi awal yang mendukung agar proses pemberdayaan dapat berlangsung secara efektif. Melalui proses penyadaran, masyarakat diarahkan untuk memahami situasi yang sedang mereka hadapi. Sehingga mereka dapat termotivasi untuk melakukan perubahan pada kondisi kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

b. Tahap Transformasi

Tahap transformasi adalah proses transformasi pengetahuan dan keterampilan. Tahap ini akan berjalan dengan baik apabila proses

penyadaran yang dilakukan pada tahap pertama telah tercapai. Pada tahap ini, masyarakat mulai belajar dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Proses ini mendorong terbukanya wawasan dan peningkatan kapasitas masyarakat, meskipun pada proses ini peran mereka masih terbatas pada partisipasi pasif (penerima manfaat).

c. Tahap Peningkatan Kemampuan Intelektual

Tahap ini merupakan tahap penguatan melalui peningkatan intelektualitas dan keterampilan masyarakat untuk mendorong terciptanya kemandirian, di mana masyarakat mampu untuk mengambil inisiatif, menghasilkan ide-ide kreatif, dan melakukan inovasi dalam lingkungannya. Masyarakat yang telah mencapai pada tahap ini, maka mereka mampu untuk melakukan pembangunan secara mandiri. Dalam konteks pembangunan masyarakat, posisi masyarakat pada tahap ini bergeser menjadi subjek atau pelaku utama pembangunan, sementara pihak eksternal seperti peran pemerintah hanya sebagai fasilitator.

C. Pemberdayaan Perempuan

1. Konsep Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan proses peningkatan kesadaran dan penguatan kapasitas agar perempuan dapat berpartisipasi dalam jangkauan yang lebih luas, terlibat dalam pengawasan serta pengambilan keputusan, dan melakukan perubahan yang mendorong terciptanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (Kusumaningsih &

Rianawati, 2024). Konsep pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, pemberdayaan dipahami sebagai proses yang menekankan pentingnya perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga perempuan memiliki kekuasaan dan suara yang diakui dalam lingkup masyarakat yang lebih luas. Kedua, pemberdayaan juga dipahami dalam konteks hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki, terutama bagaimana peningkatan peran dan posisi perempuan dapat mempengaruhi struktur sosial masyarakat yang beragam (Zakiyah, 2010).

Pemberdayaan perempuan adalah proses ketika perempuan yang sebelumnya tidak memiliki ruang atau kemampuan untuk menentukan pilihan dan mengambil keputusan, secara bertahap mulai memperoleh kekuatan atau kesempatan untuk melakukan hal tersebut sehingga mereka dapat berdaya (Aisyi et al., 2023). Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu strategi penting untuk mengembangkan kemampuan perempuan dan memperluas peran mereka, tidak hanya pada lingkup domestik tetapi juga dalam ruang publik (Zakiyah, 2010).

Pengertian di atas merujuk pada pemahaman bahwa perempuan memiliki potensi yang besar dalam memperoleh kesempatan untuk berperan di kehidupan masyarakat yang lebih luas melalui proses pemberdayaan. Artinya, proses ini mendorong perempuan untuk secara lebih aktif mengambil peran dalam pengambilan keputusan, kegiatan sosial, dan ekonomi, sehingga posisi mereka tidak lagi terbatas pada sektor domestik, tetapi juga berkontribusi secara nyata dalam sektor publik.

2. Unsur-Unsur Pemberdayaan Perempuan

Menurut Kabeer dikutip Myuox dalam Dermawan (2016), pada proses pemberdayaan perempuan terdapat lima unsur penting yang perlu diperhatikan, yang diantaranya sebagai berikut:

a. Kesejahteraan (*Welfare*)

Dalam pemberdayaan perempuan, kesejahteraan merupakan salah satu aspek yang penting. Dalam kenyataannya, akses perempuan terhadap kesejahteraan masih berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Claros dan Zahidi membagi aspek kesejahteraan dalam tiga komponen utama; pertama, partisipasi ekonomi perempuan memiliki peran yang krusial di mana mereka tidak hanya berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional; kedua, akses terhadap pendidikan menjadi fondasi utama dalam pemberdayaan yang menjadi gerbang awal mereka dapat berkontribusi pada ruang publik; ketiga, kesehatan dan kesejahteraan mencakup perbedaan mendasar antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses terhadap gizi, layanan kesehatan, fasilitas reproduksi, jaminan keselamatan, dan integritas diri.

b. Akses (*Access*)

Akses merujuk pada kemampuan perempuan untuk memperoleh hak atas berbagai sumber daya produktif, seperti lahan, kredit, pelatihan, fasilitas

pendukung, tenaga kerja, pasar, dan layanan publik dengan tingkat kesetaraan yang sama dengan laki-laki.

c. Konsientisasi (*consientisation*)

Konsientisasi mengacu pada proses peningkatan kesadaran terhadap perberdaan peran jenis kelamin dan peran gender dalam masyarakat. Proses ini penting untuk mengidentifikasi ketimpangan dan membuka ruang perubahan menuju kesetaraan.

d. Partisipasi (*participation*)

Partisipasi merujuk pada keterlibatan perempuan secara setara dalam proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan administrasi. Dalam partisipasi, diantaranya mencakup kehadiran perempuan dalam ruang publik seperti pengambilan keputusan baik secara formal maupun informal, serta keterlibatan suara mereka dalam merancang kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.

e. Kesetaraan dalam Kekuasaan (Equality of Control)

Unsur ini menggambarkan kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki posisi yang seimbang dalam mengendalikan faktor produksi serta memperoleh manfaat dari hasil kegiatan. Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, melainkan memiliki kontrol terhadap sumber daya dan hasil pembangunan.

Unsur-unsur di atas secara keseluruhan merupakan komponen penting yang ahrus diimplementasikan secara nyata agar dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan dan kesejahteraanya secara berkelanjutan.

3. Indikator Pemberdayaan Perempuan

Indikator pemberdayaan perempuan secara umum mencakup beberapa aspek yang digunakan untuk mengukur sejauh mana program pemberdayaan perempuan berhasil meningkatkan posisi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini, Kodariyah mengemukakan bahwa keberhasilan pemberdayaan perempuan dapat diidentifikasi pada 3 indikator sebagai berikut (Azizah et al., 2023):

a. Indikator Keluaran (*Output Indicator*)

Keberhasilan pemberdayaan perempuan pada indikator ini ditandai dengan telah diselenggarakannya pemberdayaan terhadap perempuan. Indikator ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan sudah terlaksana di mana perempuan telah terlibat dalam kegiatan pemberdayaan tersebut.

b. Indikator Hasil (*Income Indicator*)

Keberhasilan pemberdayaan perempuan pada indikator ini ditandai dengan kondisi di mana perempuan yang telah diberdayakan mampu berusaha menunjang ekonomi sesuai dengan keterampilan mereka. Perempuan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan mampu menghasilkan pendapatan untuk menunjang ekonomi keluarga berdasarkan kemampuan yang telah diperoleh dari program pemberdayaan tersebut.

c. Indikator Dampak (*Impact Indicator*)

Keberhasilan pemberdayaan perempuan pada indikator ini ditandai dengan perempuan yang diberdayakan telah mampu hidup layak, mampu mengembangkan usaha, berorganisasi atau bermasyarakat dan memberdayakan perempuan lain guna mengembangkan keterampilan mereka. Pada tahap ini perempuan telah berhasil mengembangkan kemampuan mereka sehingga dapat hidup secara mandiri dan berkontribusi pada perekonomian keluarga.

D. Modal Sosial

1. Konsep Modal Sosial

Modal sosial merupakan salah satu konsep kajian ilmu sosial yang telah berkembang sejak akhir abad ke-20. Definisi modal sosial secara sederhana dapat diartikan sebagai sumber daya yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang berasal dari jaringan hubungan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Modal sosial dapat dipahami sebagai kemampuan masyarakat untuk mengkoorganisir diri sendiri dalam memperjuangkan tujuan bersama. Sebagai sumber daya sosial, modal sosial memberikan kekuatan pada kondisi-kondisi sosial yang ada dalam sebuah masyarakat untuk bekerja sama secara lebih efektif (Santoso, 2020).

Modal sosial merupakan rangkaian proses yang terus berlangsung secara berkesinambungan seiring waktu. Dalam proses pembentukannya, modal sosial dipengaruhi oleh sejumlah faktor umum seperti kebiasaan, peran seseorang dalam masyarakat, tingkat pendidikan, kelas ekonomi, serta nilai-

nilai personal (Fathy, 2019). Bandari dan Yasinoubu dalam Fathy (2019), modal sosial didasari oleh keberadaan kepercayaan, norma, dan jaringan informal yang memandang hubungan sosial sebagai sumber daya penting. Ketiga unsur tersebut, yaitu norma sosial, jaringan sosial, dan kepercayaan, menjadi komponen utama dalam modal sosial dan saling terhubung satu sama lain. Namun, kekuatan modal sosial dapat melemah jika ikatan kekerabatan terganggu oleh beberapa faktor seperti perpindahan, perceraian, ataupun perpisahan. Kondisi ketika hubungan sosial melemah menunjukkan bahwa modal sosial juga ikut menurun. Situasi ini membuat pola kerja sama antaranggota masyarakat tidak berjalan optimal. Jika kerja sama sosial terganggu, maka proses penguatan dan pengembangan modal sosial menjadi semakin sulit dicapai (Fathy, 2019).

Menurut Putnam (2000) dalam bukunya yang berjudul "*Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*" menekankan bahwa modal sosial terdiri atas jaringan sosial, norma timbal balik (*reciprocity norms*), dan kepercayaan yang untuk mendorong masyarakat saling kerja sama (*collective action*) di luar aturan lembaga formal. Putnam menyatakan bahwa dengan melalui jaringan memungkinkan adanya interaksi antar individu dan kelompok, sehingga melalui itu norma dan kepercayaan dapat tumbuh dan berkembang. Masyarakat yang memiliki kondisi sosial yang sehat biasanya memiliki jaringan sosial yang kuat, yang tidak hanya memperkuat kerjasama antaranggota, tetapi juga menghasilkan manfaat melalui partisipasi bersama.

Berdasarkan definisi modal sosial dari para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa modal sosial adalah kemampuan yang muncul dari hubungan antar individu atau kelompok melalui jaringan sosial yang dibangun atas dasar kepercayaan dan norma bersama sehingga memudahkan individu tau kelompok untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama secara lebih efektif.

2. Unsur-Unsur Modal Sosial

a. Kepercayaan

Kepercayaan (*trust*) merupakan inti dari dimensi modal sosial yang memungkinkan kerja sama berjalan secara efektif. Fukuyama dalam Nisa (2022) memaknai kepercayaan sebagai bagian dari norma-norma sosial yang bersifat kooperatif, seperti kejujuran dan kesediaan untuk saling membantu, yang berlaku di dalam kelompok-kelompok sosial tertentu. Ketika anggota kelompok konsisten menerapkan perilaku yang jujur dan dapat dipercaya, maka hubungan saling percaya akan terbentuk di antara mereka. Lebih lanjut, Francis Fuyukama dalam Fahty (2019) mneyatakan bahwa pada dasarnya, modal sosial merupakan kemampuan kolektif yang bersumber dari adanya kepercayaan bersama di dalam masyarakat maupun kelompok sosial tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, kepercayaan dimaksud sebagai norma sosial yang bersifat kooperatif dan tumbuh melalui perilaku jujur serta saling membantu, sehingga membentuk keyakinan bersama yang memungkinkan individu dan kelompok bekerja sama secara efektif dan

menjadi sumber utama terbentuknya modal sosial. Jika kepercayaan ini kuat di masyarakat, maka setiap individu akan lebih mudah untuk berpartisipasi dalam kegiatan bersama dikarenakan yakin bahwa anggota masyarakat akan mematuhi norma yang ada, sehingga tidak ada keraguan yang muncul. Sebaliknya, jika kepercayaan lemah maka seseorang akan cenderung enggan berpartisipasi karena muncul rasa takut ataupun ragu.

b. Norma-Norma

Norma (*norms*) merupakan aturan tidak tertulis yang disepakati bersama dalam masyarakat dan menjadi pedoman perilaku sehari-hari. Norma adalah standar perilaku yang dijaga melalui saksi sosial sehingga individu cenderung mengikuti aturan untuk terciptanya keteraturan dan kerjasama (Coleman dalam Rahmawati, 2017). Coleman menekankan bahwa norma memudahkan koordinasi tanpa perlu kontrak formal karena adanya kesepakatan bersama yang ditaati. Norma menjadi acuan bagi setiap individu dalam bertindak, sehingga tercipta keteraturan dan kerjasama di lingkungan sosial. Norma dijaga melalui sanksi sosial, artinya jika seseorang melanggar norma maka ia akan mendapatkan teguran atau bahkan pengucilan dari masyarakat. Dengan adanya norma, proses kerjasama dapat berjalan secara lebih efektif karena setiap orang telah memahami dan menyetujui aturan yang berlaku.

c. Jaringan Sosial

Jaringan sosial (*social networks*) menjadi wadah utama bagi individu dan kelompok untuk saling berinteraksi, bertukar informasi,

serta membangun kerjasama. Menurut Coleman dalam Rahmawati (2017) Jaringan sosial merupakan struktur dinamis yang terdiri atas hubungan kerja sama antarindividu. Melalui jaringan ini, proses komunikasi dan interaksi dapat berlangsung, sehingga kepercayaan berkembang dan hubungan kerja sama semakin menguat.

Jaringan sosial merupakan hubungan antar individu atau kelompok yang saling berhubungan dan saling berinteraksi untuk memudahkan seseorang bertukar informasi, saling membantu, serta kerjasama dalam mengatur tanggung jawab masing-masing dalam bertugas. Dengan adanya jaringan sosial masyarakat bisa lebih mudah mengajak orang lain berpartisipasi, membagi tugas, serta memastikan kegiatan berjalan secara efektif.

3. Bentuk Modal Sosial

Putnam dalam Santoso (2020) membedakan modal sosial dalam dua tipe utama modal sosial, yaitu *bonding social capital* dan *bridging social capital*. Kedua bentuk modal sosial memiliki peran dan karakteristik yang berbeda dalam membentuk pola kerjasama dan keterlibatan masyarakat. Kemudian, Michael Woolcock mengembangkan teori Putnam dengan munculnya *linking social capital*, yakni hubungan vertikal antara masyarakat dengan instansi atau lembaga yang memiliki sumber daya lebih besar (Shanti et al., 2021). Merujuk pada pendapat Putnam dan Woolcock sebelumnya, maka bentuk modal sosial dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. *Bonding Social Capital* (Modal Sosial Pengikatan)

Modal sosial pengikatan adalah jenis modal sosial yang terbentuk dalam kelompok homogen dengan ikatan yang erat, seperti keluarga, kelompok agama, atau komunitas kecil yang memiliki kesamaan latar belakang. Putnam menyatakan bahwa bonding social capital bersifat “*inward looking*” atau melihat ke dalam, yang cenderung memperkuat identitas eksklusif dan membangun solidaritas internal kelompok (Santoso, 2020). Bentuk modal sosial pengikatan disini dapat dipahami sebagai bentuk modal sosial yang terbangun atas dasar ikatan-ikatan eksklusif dan homogen, artinya interaksi dan kerja sama lebih banyak terjadi di dalam kelompok sendiri. Modal sosial pengikat memiliki hubungan personal yang sangat kuat antar anggota, sehingga keterikatan ini cenderung menganggap orang di luar kelompok sebagai “*outsiders*” (Santoso, 2020).

b. *Bridging Social Capital* (Modal Sosial Penjembatanan)

Modal sosial penjembatanan adalah bentuk modal sosial yang menghubungkan individu atau kelompok dari latar belakang yang berbeda. Putnam menyebut tipe modal sosial ini sebagai “*outward looking*” atau melihat keluar, yang mencakup berbagai latar belakang yang berbeda seperti lintas agama, lintas usia, atau lintas profesi. Putnam menekankan bahwa *bridging social capital* bersifat inklusif dan membuka peluang kerjasama yang lebih luas karena melibatkan banyak pihak dengan beragam pengalaman dan pengetahuan. Hubungan yang terjalin lebih

terbuka dan fleksibel, sehingga pertukaran informasi, inovasi, dan akses terhadap sumber daya eksternal menjadi lebih mudah.

c. *Social Linking* (Jaringan Sosial)

Social linking merupakan bentuk modal sosial yang menggambarkan hubungan yang terbentuk di antara berbagai aspek lapisan masyarakat, termasuk kekuatan sosial, status, dan peran seseorang dalam kelompok. Woolcock dan Szreter menyatakan bahwa *social linking* membantu individu membangun hubungan dan memperluas jaringan mereka dengan lembaga atau orang yang memiliki pengaruh lebih besar, misalnya dalam mencari pekerjaan, mendapatkan layanan, atau mengakses sumber daya penting (Shanti et al., 2021). Artinya, *social linking* merupakan hubungan interaksi yang dibangun oleh masyarakat dengan institusi lainnya seperti pemerintah atau pelayanan publik (Shanti et al., 2021).

E. Pengelolaan Sampah

Sampah merupakan material yang dibuang karena tidak lagi memiliki fungsi, yang umumnya berasal dari aktivitas manusia dan tidak terbentuk secara alami (Zuraidah et al., 2022). Sejati Kuncoro dalam Aryansyah, dkk., (2022) sampah secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama. Pertama, sampah organik atau basah adalah limbah yang berasal dari bahan-bahan alami seperti daun, sisa makanan, sisa sayuran, dan buah-buahan yang dimana jenis sampah ini memiliki kemampuan untuk terurai secara alami. Kedua, sampah organik atau kering merupakan limbah yang tidak dapat terurai secara alami, misalnya seperti logam, kaleng, karet, plastik, dan botol. Ketiga, sampah

bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah limbah yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia. Sampah jenis ini biasanya berupa seperti suntik bekas, baterai, limbah kimia, serta material lain yang mengandung zat beracun sehingga memerlukan penanganan khusus.

Sampah perlu dikelola dengan baik agar dapat memiliki nilai tambah, dapat dimanfaatkan kembali, serta tidak menimbulkan pencemaran lingkungan (Mahyudin, 2014). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa hasil aktivitas manusia sehari-hari atau proses alam yang berbentuk padat. Sisa tersebut perlu dikelola secara tepat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan yang mencakup upaya pengurangan serta penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan jumlah sampah yang dihasilkan, proses daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Sementara itu, penanganan sampah merupakan rangkaian kegiatan meliputi proses pemilahan sampah yakni mengelompokkan dan memisahkan sampah berdasarkan jenis dan karakteristiknya (Kakesing et al., 2022).

1. Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

Pada konteks pengurangan sampah, salah satu upaya untuk melakukan pengurangan sampah adalah melalui strategi prinsip 3R untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya, sehingga dapat menekan volume sampah yang berakhir di TPA (Nurfitria et al., 2024). Prinsip pertama dalam

konsep 3R, reduce atau pengurangan merupakan prinsip yang menekankan sikap bijak dalam konsumsi, mempertimbangkan setiap keputusan pembelian, dan berupaya menekan timbulan sampah dari rumah tangga; Prinsip kedua, reuse atau penggunaan kembali merupakan prinsip yang menekankan memanfaatkan kembali barang yang masih layak sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan sampah yang masuk ke TPA; Prinsip ketiga, recycle atau daur ulang berfokus pada proses pengumpulan dan pengelolaan sampah menjadi bahan baku baru. Pengelolaan sampah melalui prinsip ini tidak hanya mengurangi pemakaian sumber daya alam, tetapi juga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan (Putranto, 2023).

2. Tahapan Pengelolaan Sampah

Pada konteks penanganan sampah, Selomo dalam Purwendah, dkk. (2022), menyatakan kegiatan penanganan sampah terbagi dalam beberapa tahapan diantaranya:

- a. Pemilahan, dalam hal ini sampah dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenis limbah, ukuran, dan karakteristiknya
- b. Pengumpulan, pada tahap ini mencakup pengambilan dan perpindahan sampah dari sumber sampah ke fasilitas penyimpanan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu
- c. Pengangkutan, tahap ini berarti mengirimkan sampah dari sumbernya menuju lokasi penyimpanan sementara atau pusat pengolahan ke tempat pemrosesan akhir

- d. Pengolahan dalam bentuk memodifikasi sifat, komposisi, dan volume sampah
- e. Pemrosesan akhir, pada tahap ini dilakukan pengembalian sampah atau sisa dari pengolahan sebelumnya ke lingkungan dengan cara yang aman dan berkelanjutan.

F. Bank Sampah

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah model pengelolaan yang melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Keterlibatan masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa permasalahan sampah merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya pihak tertentu (Mawarti, 2013). Bank sampah merupakan model pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat yang paling efektif dalam menggabungkan aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan lingkungan. Bank sampah adalah sistem pengelolaan sampah yang menggunakan prinsip 3R dengan pendekatan tabungan, di mana masyarakat dapat menabung sampah yang memiliki nilai ekonomi dan kemudian ditukar dengan uang atau barang. Dalam Yudiatmaja, dkk (2021) mengemukakan bahwa model operasional bank sampah sangat beragam dan biasanya menyesuaikan dengan kondisi lokal, beberapa model bank sampah diantaranya sebagai berikut:

1. Bank Sampah Mandiri

Salah satu bentuk yang banyak ditemui adalah Bank Sampah Mandiri, yaitu bank sampah yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat dengan struktur organisasi yang jelas. Model ini cenderung memiliki tingkat keberlanjutan

yang tinggi karena kepemilikan dan pengelolaan berada langsung di tangan masyarakat.

2. Bank Sampah Binaan

Adapun model bank sampah seperti Bank Sampah Binaan, yang umumnya diinisiasi dan didampingi oleh pemerintah atau LSM. Model ini efektif dalam tahap awal pengembangan, namun membutuhkan strategi keberlanjutan yang jelas.

3. Bank Sampah Korporat

Bank Sampah Korporat terbentuk sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Model ini biasanya memiliki akses sumber daya yang lebih baik, baik dari segi pendanaan ataupun manajemennya. Akan tetapi, keberlanjutan model ini sangat ditentukan oleh komitmen jangka panjang perusahaan.

